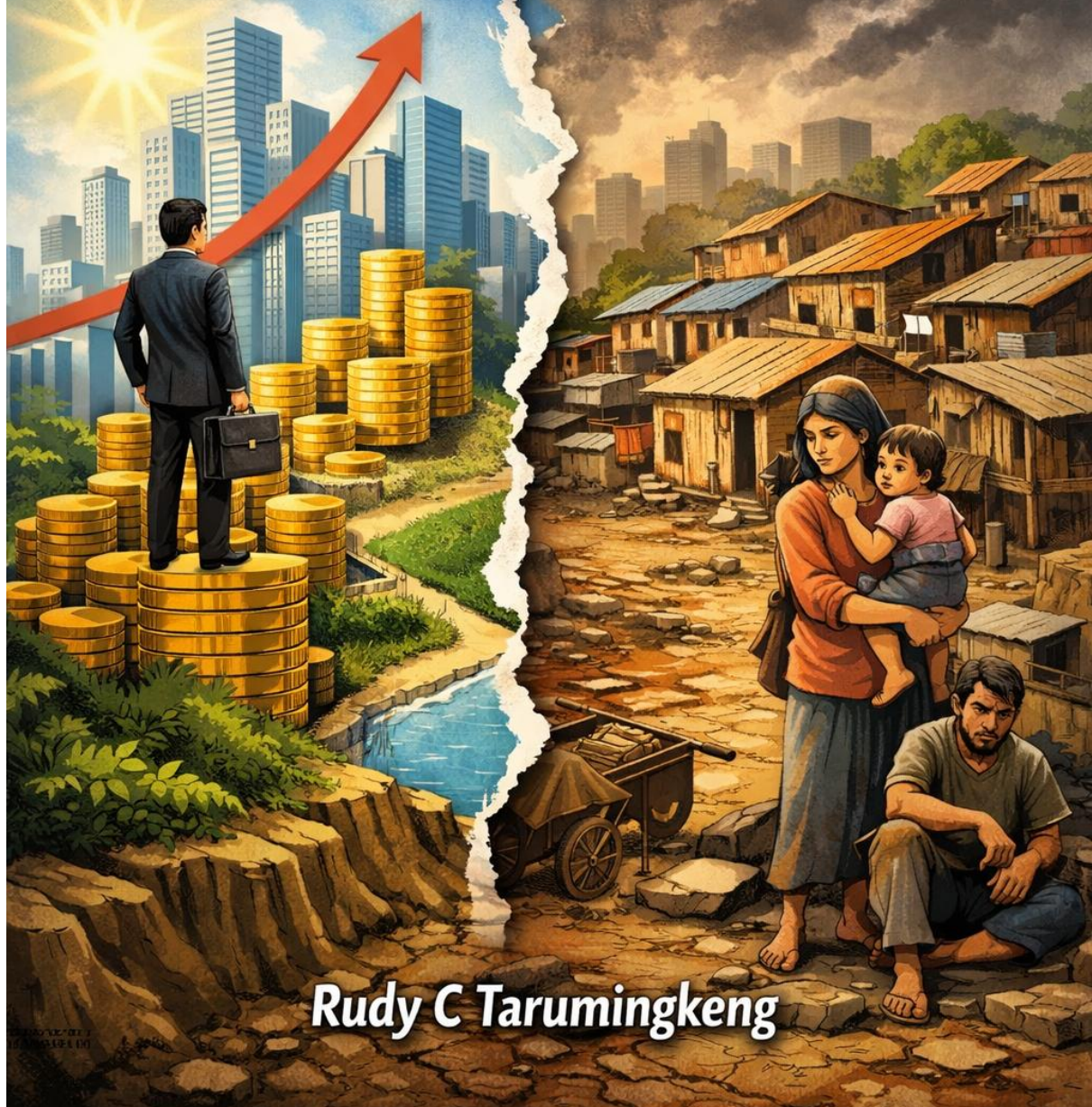


Pertumbuhan tanpa Pemerataan:

**Mengapa Kinerja Makro Belum Selalu
Menjadi Kesejahteraan Mikro?**



Rudy C Tarumingkeng

Rudy C Tarumingkeng: Pertumbuhan tanpa Pemerataan: Mengapa Kinerja Makro Belum Selalu Menjadi Kesejahteraan Mikro

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudict75@gmail.com

1 April 2026

PERTUMBUHAN TANPA PEMERATAAN: MENGAPA KINERJA MAKRO BELUM SELALU MENJADI KESEJAHTERAAN MIKRO?

Abstrak

Makalah ini membahas paradoks pembangunan Indonesia pada awal 2026: indikator makroekonomi relatif menunjukkan ketahanan, tetapi kesejahteraan pada tingkat rumah tangga tidak selalu meningkat secara sebanding. Data resmi menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen, PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta, ekspor barang dan jasa menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi, inflasi inti tetap relatif terkendali, keyakinan konsumen berada pada level optimistis, dan penjualan eceran masih tumbuh. Pada saat yang sama, persentase penduduk miskin menurun menjadi 8,25 persen dan gini ratio turun menjadi 0,363. Namun, berbagai indikator lain memperlihatkan bahwa perbaikan makro tersebut belum otomatis menjadi kesejahteraan mikro yang merata. Inflasi Februari 2026 naik menjadi 4,76 persen, rata-rata upah buruh pada November 2025 hanya Rp3,33 juta, kemiskinan perdesaan tetap jauh lebih tinggi daripada perkotaan, ketimpangan perkotaan masih lebih lebar daripada perdesaan, dan struktur pekerjaan Indonesia masih didominasi keterbatasan good jobs. Laporan Bank Dunia bahkan menunjukkan bahwa proporsi pekerjaan menengah kelas menurun, pangsa pekerja pada pekerjaan berketerampilan tinggi tetap rendah dan

stagnan, serta lulusan universitas semakin banyak masuk ke pekerjaan berketerampilan lebih rendah. Makalah ini berargumen bahwa kesenjangan antara kinerja makro dan kesejahteraan mikro di Indonesia lahir dari kombinasi lima faktor: pertumbuhan yang terkonsentrasi secara spasial dan sektoral, kualitas pekerjaan yang belum memadai, tekanan biaya hidup, kerentanan rumah tangga di sekitar garis kemiskinan, dan distribusi manfaat pertumbuhan yang belum cukup inklusif. Dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis data resmi dan laporan lembaga internasional mutakhir, makalah ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap penting, tetapi tanpa pemerataan produktivitas, kesempatan kerja berkualitas, dan akses layanan dasar, pertumbuhan tidak otomatis menjadi kesejahteraan yang terasa di tingkat rumah tangga. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kata kunci: *pertumbuhan ekonomi, pemerataan, kesejahteraan mikro, ketimpangan, kemiskinan, pasar kerja, Indonesia 2026*

Pertumbuhan tanpa Pemerataan: Mengapa Kinerja Makro Belum Selalu Menjadi Kesejahteraan Mikro

Pendahuluan

Indonesia memasuki 2026 dengan narasi makroekonomi yang pada banyak sisi tampak cukup kuat. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen, lebih tinggi dibanding 2024 yang tumbuh 5,03 persen. PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun, sedangkan PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta atau sekitar USD5.083,4. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa tumbuh paling tinggi, yaitu 7,03 persen, sementara secara spasial Pulau Jawa masih mendominasi struktur ekonomi nasional dengan kontribusi 56,93 persen. Gambaran ini mudah dibaca sebagai tanda bahwa

Rudy C Tarumíngkeng: Pertumbuhan tanpa Pemerataan: Mengapa Kinerja Makro Belum Selalu Menjadi Kesejahteraan Mikro

mesin ekonomi nasional tetap berjalan relatif baik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, keberhasilan agregat tersebut tidak selalu identik dengan pengalaman kesejahteraan sehari-hari. Dalam ruang hidup rumah tangga, ukuran kesejahteraan tidak berhenti pada pertumbuhan PDB, tetapi menyentuh pertanyaan yang lebih konkret: apakah pendapatan cukup untuk membayar kebutuhan pokok, apakah biaya hidup masih terjangkau, apakah pekerjaan yang tersedia memberi ruang mobilitas sosial, dan apakah keluarga memiliki cadangan untuk menghadapi risiko. Pada titik ini, muncul paradoks yang penting: suatu negara dapat mencatat pertumbuhan yang sehat, kemiskinan yang menurun, dan konsumsi yang masih bergerak, tetapi tetap menyisakan perasaan sempit, rentan, dan tidak aman di tingkat keluarga. Paradoks itulah yang menjadi titik tolak makalah ini. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Paradoks tersebut makin nyata bila indikator distribusi dan biaya hidup dibaca berdampingan. Persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2025 memang turun menjadi 8,25 persen atau 23,36 juta orang, dan gini ratio juga turun menjadi 0,363. Tetapi angka kemiskinan perdesaan masih 10,72 persen, jauh di atas perkotaan yang 6,60 persen; gini ratio perkotaan juga tetap lebih tinggi, yakni 0,383, dibanding perdesaan 0,295. Selain itu, inflasi tahunan Februari 2026 meningkat menjadi 4,76 persen, lebih tinggi dibanding Januari 2026 sebesar 3,55 persen. Dengan kata lain, sebagian indikator distribusi membaik, tetapi tekanan biaya hidup dan ketimpangan spasial tetap kuat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Masalah yang lebih mendasar terletak pada kualitas transformasi ekonomi itu sendiri. Laporan *Indonesia Country Growth and Jobs Report* dari Bank Dunia menegaskan bahwa Indonesia berhasil mencapai status upper-middle-income pada 2023, tetapi pertumbuhan kini melambat dibanding dekade sebelumnya dan pangsa good jobs justru menyusut. Laporan itu

menunjukkan bahwa proporsi pekerjaan kelas menengah turun dari 14 persen pada 2019 menjadi 8,4 persen pada 2023; sekitar 70 persen investasi masih mengalir ke sektor bernilai lebih rendah; pangsa pekerja pada pekerjaan berketerampilan tinggi hanya naik dari 7,6 persen pada 2014 menjadi 8,8 persen pada 2023; dan lulusan universitas semakin banyak masuk ke pekerjaan yang lebih rendah keterampilannya. Di sinilah letak persoalannya: pertumbuhan tetap terjadi, tetapi mesin pertumbuhan itu belum cukup menghasilkan mobilitas sosial yang luas.

Makalah ini bertujuan menjawab pertanyaan: **mengapa kinerja makro yang cukup baik belum selalu menjadi kesejahteraan mikro yang dirasakan luas di Indonesia?** Argumen utama makalah ini adalah bahwa pertumbuhan tanpa pemerataan terjadi ketika kenaikan output nasional tidak disertai perluasan good jobs, produktivitas bernilai tinggi, pemerataan spasial, dan perlindungan terhadap tekanan biaya hidup. Oleh sebab itu, pertumbuhan makro harus dipahami sebagai kondisi yang perlu, tetapi belum cukup. Ia baru benar-benar bermakna secara sosial bila manfaatnya mengalir ke struktur pendapatan rumah tangga, kualitas pekerjaan, biaya hidup yang terjangkau, dan distribusi peluang yang lebih setara. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pertumbuhan, Pemerataan, dan Kesejahteraan Mikro: Kerangka Analitis

Dalam literatur pembangunan, pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui peningkatan output nasional, terutama PDB. Pertumbuhan penting karena memperluas kapasitas ekonomi: lebih banyak barang dan jasa diproduksi, pendapatan nasional meningkat, dan negara memiliki ruang fiskal lebih besar untuk membiayai layanan publik. Indonesia sendiri dalam beberapa dekade terakhir memang menikmati manfaat ini. Bank Dunia mencatat bahwa selama 2000–2024 tingkat pengangguran turun dari 9 persen ke sekitar 5 persen, pangsa pekerjaan nonpertanian meningkat, dan sekitar 70 persen penurunan kemiskinan berasal dari pendapatan tenaga

kerja. Secara historis, ini berarti pertumbuhan telah berkontribusi nyata terhadap perbaikan standar hidup.

Akan tetapi, pertumbuhan tidak identik dengan pemerataan. Output nasional dapat meningkat tanpa distribusi manfaat yang seimbang. Hal ini terjadi bila pertumbuhan terkonsentrasi pada wilayah tertentu, pada kelompok pendidikan tertentu, pada sektor dengan keterkaitan terbatas terhadap rumah tangga bawah, atau pada pekerjaan dengan kualitas yang rendah. Dalam situasi demikian, rata-rata nasional membaik, tetapi median pengalaman hidup tidak bergerak secepat itu. Sebagian orang memperoleh manfaat besar, sebagian lain hanya menerima limpahan tipis, dan sebagian lagi bahkan harus berhadapan dengan kenaikan biaya hidup yang menghapus sebagian pendapatan tambahannya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itu, kesejahteraan mikro harus dibaca lebih luas daripada sekadar pendapatan nominal. Ia mencakup daya beli, stabilitas pekerjaan, kesempatan naik kelas, kualitas layanan publik, akses pendidikan dan kesehatan, serta kemampuan rumah tangga menyerap guncangan. Sebuah keluarga mungkin tidak tergolong miskin secara statistik, tetapi tetap rapuh jika hampir seluruh pendapatannya habis untuk makanan, transportasi, sewa, listrik, dan cicilan. Dalam kondisi seperti ini, sedikit inflasi atau penurunan omzet dapat langsung mengubah rasa aman menjadi kecemasan. Kerangka inilah yang membantu menjelaskan mengapa makro yang tampak sehat belum tentu identik dengan mikro yang sejahtera. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Potret Makroekonomi Indonesia pada Awal 2026

Dari sisi agregat, Indonesia memang tidak sedang berada dalam fase krisis. Selain pertumbuhan 5,11 persen pada 2025, neraca perdagangan Januari 2026 masih mencatat ekspor sebesar US\$22,16 miliar dan impor US\$21,20 miliar, sehingga Indonesia tetap membukukan surplus perdagangan. Bank Dunia juga menilai ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah

Rudy C Tarumingkeng: Pertumbuhan tanpa Pemerataan: Mengapa Kinerja Makro Belum Selalu Menjadi Kesejahteraan Mikro

ketidakpastian global, dengan pertumbuhan 5,0 persen pada sembilan bulan pertama 2025 dan proyeksi yang bertahan sekitar level tersebut pada 2026–2027. Cadangan devisa pada akhir Februari 2026 juga tetap tinggi sebesar US\$151,9 miliar, setara 6,1 bulan impor. Semua ini menunjukkan bahwa secara eksternal Indonesia masih memiliki bantalan yang cukup baik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di sisi domestik, indikator permintaan juga menunjukkan ketahanan. Survei Konsumen Bank Indonesia untuk Februari 2026 mencatat Indeks Keyakinan Konsumen sebesar 125,2, yang berarti masih berada pada zona optimistis. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini berada di 115,9, sedangkan Indeks Ekspektasi Konsumen 134,4. Pada saat yang sama, BI memperkirakan Indeks Penjualan Riil Februari 2026 tumbuh 6,9 persen secara tahunan dan 4,4 persen secara bulanan, didorong peningkatan penjualan mayoritas kelompok barang saat Ramadan dan menjelang Idulfitri. Dengan demikian, konsumsi belum menunjukkan keruntuhan; bahkan secara umum masih tetap berjalan. ([Bank Indonesia](#))

Stabilitas moneter juga masih dijaga ketat. Bank Indonesia pada Maret 2026 mempertahankan BI-Rate di 4,75 persen untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga sasaran inflasi 2026–2027 pada kisaran $2,5 \pm 1$ persen, di tengah memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah. Pada saat yang sama, BI menilai kinerja neraca pembayaran tetap perlu diperkuat agar dapat memitigasi dampak perang, sementara rupiah pada 16 Maret 2026 berada di sekitar Rp16.985 per dolar AS. Artinya, makro Indonesia cukup kuat, tetapi kewaspadaan juga tetap tinggi. ([Bank Indonesia](#))

Gambaran ini penting karena ia menegaskan titik berangkat analisis: masalah Indonesia bukan semata-mata tidak adanya pertumbuhan atau runtuhnya stabilitas makro. Sebaliknya, masalahnya justru lebih subtil dan lebih struktural. Ketika pertumbuhan, perdagangan, konsumsi, dan stabilitas eksternal relatif tetap terjaga, tetapi sebagian besar rumah tangga

belum merasakan kenaikan kualitas hidup secara proporsional, maka pertanyaan utamanya bergeser dari “apakah ekonomi tumbuh?” menjadi “siapa yang benar-benar menikmati pertumbuhan itu, dalam bentuk apa, dan seberapa tahan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari?” ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Mengapa Kinerja Makro Belum Selalu Menjadi Kesejahteraan Mikro?

1. Pertumbuhan masih terkonsentrasi secara spasial

Salah satu penjelasan terpenting terletak pada konsentrasi geografis pertumbuhan. BPS mencatat bahwa pada 2025 kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi 56,93 persen. Dominasi ini tidak otomatis berarti wilayah lain tidak tumbuh, tetapi ia menunjukkan bahwa pusat gravitasi aktivitas ekonomi, nilai tambah, pasar kerja formal, dan investasi masih sangat berat di Jawa. Dalam negara kepulauan seperti Indonesia, konsentrasi semacam ini berarti kualitas akses terhadap peluang ekonomi tidak tersebar merata. Rumah tangga di wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan menghadapi peluang kerja, akses pasar, kualitas logistik, dan pendapatan yang berbeda. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Perbedaan itu tercermin pada profil kemiskinan. Pada September 2025, persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 6,60 persen, sedangkan di perdesaan 10,72 persen. Jumlah penduduk miskin di perdesaan pun masih lebih besar daripada di perkotaan. Data ini menegaskan bahwa penurunan kemiskinan nasional tidak menghapus dualisme wilayah. Secara nasional, angka membaik; tetapi pada wilayah perdesaan, tekanan struktural—seperti produktivitas rendah, keterbatasan infrastruktur ekonomi, dan ketergantungan pada sektor primer—masih membuat kesejahteraan mikro bergerak lebih lambat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketimpangan pengeluaran juga menampilkan pola serupa. Gini ratio nasional memang turun menjadi 0,363, tetapi di perkotaan masih 0,383, jauh di atas perdesaan yang 0,295. Sementara itu, porsi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah secara nasional hanya 19,28 persen; di perkotaan bahkan 18,32 persen. Ini berarti walaupun ketimpangan membaik secara umum, distribusi pengeluaran tetap menunjukkan bahwa bagian bawah masyarakat belum memperoleh porsi manfaat ekonomi yang besar. Dalam konteks kesejahteraan mikro, ini berarti pertumbuhan masih lebih cepat memperbesar agregat daripada memperlebar rasa aman ekonomi di lapisan bawah dan menengah bawah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

2. Pekerjaan bertambah, tetapi good jobs tidak cukup banyak

Penjelasan kedua adalah kualitas pekerjaan. BPS melaporkan bahwa pada November 2025 jumlah penduduk bekerja mencapai 147,91 juta orang, naik 1,371 juta orang dibanding Agustus 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,74 persen. Bila dibaca sekilas, data ini tampak menggembirakan: lapangan kerja bertambah dan pengangguran turun. Namun, World Bank memberi peringatan penting bahwa persoalan utama Indonesia bukan semata kekurangan pekerjaan, melainkan kekurangan good job opportunities. Pangsa pekerja pada pekerjaan berketerampilan tinggi hanya naik tipis dari 7,6 persen pada 2014 menjadi 8,8 persen pada 2023. Ini menunjukkan bahwa transformasi pasar kerja ke arah pekerjaan bernilai tambah tinggi berjalan terlalu lambat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Dunia bahkan menunjukkan bahwa Indonesia kini menghadapi penyusutan pekerjaan kelas menengah. Dari 85 juta pencari nafkah pada 2018, hanya 13 juta yang memiliki pendapatan cukup untuk menopang keluarga berempat pada standar kelas menengah, dan pangsa middle-class jobs turun dari 14 persen pada 2019 menjadi 8,4 persen pada 2023. Dengan kata lain, masalah Indonesia bukan hanya penciptaan kerja, tetapi

kemampuan ekonomi menghasilkan pekerjaan yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup. Bila pertumbuhan terutama menciptakan pekerjaan berproduktivitas rendah, informal, atau berupah terbatas, maka kinerja makro akan gagal diterjemahkan menjadi mobilitas sosial yang luas.

Masalah ini makin tajam pada generasi muda dan terdidik. Menurut Bank Dunia, walaupun pengangguran total rendah, pengangguran muda di 2024 masih mendekati 18 persen. Lulusan universitas pun semakin banyak mengambil pekerjaan berketerampilan lebih rendah, dan pangsa lulusan universitas yang bekerja di pekerjaan berketerampilan tinggi turun dari 56 persen pada 2014 menjadi 50 persen pada 2023. Fenomena ini menggambarkan adanya mismatch struktural: pendidikan meningkat, tetapi permintaan terhadap pekerjaan berkualitas tidak bertumbuh cukup cepat. Bagi rumah tangga, kondisi semacam ini membuat investasi pendidikan tidak selalu segera berubah menjadi keamanan ekonomi.

3. Struktur investasi dan sektor pertumbuhan belum cukup inklusif

Kinerja makro yang baik juga tidak otomatis inklusif bila investasi mengalir ke sektor bernilai tambah rendah. Bank Dunia menilai sekitar 70 persen investasi Indonesia selama 15 tahun terakhir masih mengalir ke manufaktur dan jasa bernilai lebih rendah, bukan ke industri yang kompetitif secara global seperti elektronik, farmasi, otomotif, atau ICT. Di saat yang sama, banyak layanan jasa tetap bernilai rendah dan berorientasi domestik, bukan jasa bernilai tinggi yang memperluas daya saing dan upah. Struktur investasi semacam ini menjelaskan mengapa pertumbuhan dapat tetap stabil, tetapi kualitas pekerjaan dan produktivitas pendapatan rumah tangga tidak melonjak setara.

Secara historis, Bank Dunia juga menunjukkan bahwa produktivitas manufaktur Indonesia telah menurun sekitar 20–30 persen sejak awal 1990-an, dan pertumbuhan perusahaan semakin banyak ditopang oleh kekuatan pasar daripada produktivitas. Ini berarti sebagian besar sumber daya ekonomi cenderung terserap ke pelaku dan sektor yang dominan,

bukan ke sektor yang paling inovatif dan produktif. Konsekuensinya bukan hanya soal efisiensi ekonomi, tetapi juga soal distribusi manfaat. Bila sumber pertumbuhan berada di sektor yang tidak intensif menciptakan good jobs, maka pertumbuhan akan lebih mudah tampak pada laporan makro daripada pada dompet rumah tangga.

4. Upah naik lambat, biaya hidup terasa cepat

Persoalan mikro rumah tangga juga sangat dipengaruhi oleh ketegangan antara pendapatan dan biaya hidup. Rata-rata upah buruh pada November 2025 tercatat Rp3,33 juta. Di atas kertas, ini menunjukkan adanya pendapatan kerja; tetapi dalam praktik, nominal tersebut tidak selalu memberi ruang aman yang memadai, terutama bagi rumah tangga perkotaan yang menghadapi biaya makan, transportasi, sewa, listrik, pendidikan, kesehatan, dan cicilan. Ketika mayoritas pendapatan habis untuk pengeluaran rutin, maka sedikit kenaikan harga langsung terasa lebih tajam daripada kenaikan pendapatan nominal yang terbatas. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Tekanan ini diperkuat oleh inflasi. BPS mencatat inflasi tahunan Februari 2026 sebesar 4,76 persen, naik dari Januari 2026 yang 3,55 persen. Komponen inti memang hanya 2,63 persen, tetapi dari sudut pandang rumah tangga, yang paling dirasakan sering kali bukan rata-rata statistik, melainkan harga kebutuhan yang dibeli berulang. BI menilai inflasi Februari 2026 dipengaruhi inflasi inti dan volatile food yang terkendali serta deflasi administered prices secara bulanan, tetapi tetap saja angka tahunan 4,76 persen berarti biaya hidup sedang menanjak lebih cepat. Bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah bawah, inflasi seperti ini dapat menggerus manfaat pertumbuhan yang secara nominal tampak positif. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Lebih jauh lagi, penjualan eceran yang tetap tumbuh tidak selalu berarti rumah tangga lebih sejahtera. Pertumbuhan penjualan eceran Februari 2026 sebesar 6,9 persen sebagian didorong Ramadan dan persiapan

Idulfitri, dua momen di mana konsumsi sering meningkat karena kebutuhan sosial dan budaya, bukan semata karena peningkatan kenyamanan ekonomi. Kenaikan konsumsi musiman dapat terjadi bersamaan dengan pengetatan anggaran pada pos lain atau dengan menurunnya kemampuan menabung. Karena itu, indikator konsumsi yang kuat perlu dibaca hati-hati; ia bisa menandakan ketahanan, tetapi belum tentu mencerminkan kelonggaran kesejahteraan mikro. ([Bank Indonesia](#))

5. Kemiskinan turun, tetapi kerentanan tetap luas

Perbaikan angka kemiskinan adalah capaian penting dan tidak boleh diremehkan. Pada September 2025, jumlah penduduk miskin turun menjadi 23,36 juta orang atau 8,25 persen. Namun, angka ini tetap berarti bahwa puluhan juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan lebih banyak lagi berada sedikit di atas garis itu dalam kondisi yang rapuh. Rumah tangga di zona rentan ini sangat mudah terdorong kembali ke bawah garis kemiskinan bila terjadi inflasi pangan, sakit, kehilangan pekerjaan, atau penurunan pendapatan usaha mikro. Karena itu, kesejahteraan mikro tidak dapat diukur hanya dari seberapa banyak orang keluar dari kemiskinan, tetapi juga dari seberapa stabil mereka bertahan di atasnya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Dunia membantu menjelaskan persoalan ini dari sisi pasar kerja. Menurut laporan mereka, pertumbuhan Indonesia selama beberapa dekade memang berhasil menurunkan kemiskinan dan menciptakan pekerjaan, tetapi pergeseran pekerja dari pekerjaan informal berupah rendah menuju pekerjaan menengah-tinggi berjalan terlalu lambat. Karena investasi dan pertumbuhan masih banyak terserap ke sektor bernilai rendah, kelas menengah tidak mengembang secepat yang dibutuhkan. Dengan demikian, banyak rumah tangga mungkin tidak lagi miskin, tetapi belum memiliki kualitas pendapatan, aset, dan stabilitas yang cukup untuk merasa aman. Inilah yang menjembatani penjelasan antara angka kemiskinan yang membaik dan keluhan kesejahteraan yang tetap terasa.

6. Optimisme makro dapat hidup berdampingan dengan kehati-hatian mikro

Fakta bahwa Indeks Keyakinan Konsumen Februari 2026 berada di 125,2 menunjukkan bahwa masyarakat secara umum masih optimistis terhadap kondisi ekonomi. Tetapi optimisme agregat bukan berarti semua kelompok masyarakat mengalami kenyamanan ekonomi yang sama. Indeks semacam ini menangkap sentimen rata-rata, sedangkan tekanan biaya hidup, kualitas pekerjaan, dan kerentanan keuangan tersebar tidak merata. Dalam masyarakat yang sangat beragam secara pendapatan dan wilayah, optimisme kelompok menengah atas dapat menaikkan rata-rata nasional, sementara kelompok bawah masih menanggung pengetatan anggaran. ([Bank Indonesia](#))

Karena itu, penting membedakan antara **resiliensi konsumsi** dan **kesejahteraan yang merata**. Indonesia dapat tetap menunjukkan konsumsi, penjualan eceran, dan keyakinan yang relatif kuat justru karena rumah tangga beradaptasi: mengurangi kualitas konsumsi, menunda pembelian tahan lama, mengambil kerja tambahan, memanfaatkan jaringan keluarga, atau mengurangi tabungan. Adaptasi ini menjaga stabilitas makro, tetapi tidak selalu menandakan bahwa tekanan mikro sudah hilang. Dengan kata lain, makro dapat tampak baik karena rumah tangga terus menyesuaikan diri, bukan karena seluruh rumah tangga sudah hidup lebih longgar. ([Bank Indonesia](#))

Ilustrasi Naratif: Rumah Tangga yang “Tidak Miskin”, tetapi Belum Lega

Bayangkan sebuah keluarga di kota menengah di Jawa. Suami bekerja sebagai pegawai kontrak pada sektor jasa dengan pendapatan sekitar rata-rata upah buruh nasional. Istri menjalankan usaha kecil berbasis pesanan. Mereka tidak tergolong miskin secara statistik, anak-anak tetap sekolah, listrik masih menyala, dan konsumsi sehari-hari masih berjalan. Pada bulan biasa, pendapatan mereka cukup; tetapi ketika harga makanan meningkat,

ongkos transport naik, atau pesanan usaha menurun, keseimbangan keuangan rumah tangga langsung goyah. Mereka mungkin tetap berbelanja saat Ramadan, tetapi harus mengurangi pengeluaran lain, menunda pembelian barang tahan lama, atau memakai tabungan kecil yang dimiliki. Kondisi semacam ini menjelaskan bagaimana rumah tangga dapat tetap aktif dalam perekonomian, tetapi secara subjektif tetap merasa hidup sedang “berat.” ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Narasi itu juga berlaku di perdesaan, dengan bentuk yang sedikit berbeda. Sebuah keluarga tani mungkin diuntungkan oleh momen harga komoditas tertentu, tetapi tetap rentan karena biaya pupuk, transportasi, akses pasar, dan ketidakpastian cuaca. Data kemiskinan yang lebih tinggi di perdesaan menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan belum menyebar merata ke wilayah semacam ini. Bahkan ketika secara nasional pertumbuhan positif dan gini ratio membaik, rumah tangga perdesaan masih bergerak dalam ruang kesempatan yang lebih sempit. Perbedaan spasial inilah yang membuat makro nasional kerap terasa abstrak bila dibanding pengalaman hidup lokal. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Implikasi Kebijakan

Implikasi pertama adalah bahwa kebijakan pembangunan perlu bergeser dari sekadar menjaga pertumbuhan menuju **mendistribusikan kualitas pertumbuhan**. Pertumbuhan 5 persen tetap penting, tetapi laporan Bank Dunia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pertumbuhan di atas 6 persen untuk melaju ke status negara berpendapatan tinggi pada 2045, dan lebih penting lagi, pertumbuhan itu harus datang dari produktivitas serta pekerjaan yang lebih baik. Itu berarti prioritas kebijakan perlu memperbesar sektor bernilai tambah tinggi, memperdalam manufaktur kompetitif, dan membuka jasa modern yang mampu menciptakan upah lebih tinggi. Tanpa transformasi semacam itu, pertumbuhan akan tetap menghasilkan output, tetapi tidak cukup banyak menghasilkan mobilitas sosial.

Implikasi kedua adalah pembenahan pasar kerja. Data BPS menunjukkan pengangguran terbuka sudah relatif rendah, sehingga tantangannya kini lebih bergeser ke kualitas pekerjaan dan tingkat upah. Negara perlu menghubungkan pendidikan, pelatihan, dan industrialisasi secara lebih rapat agar lulusan tidak terus terdorong ke pekerjaan di bawah kualifikasinya. Ketika Bank Dunia menunjukkan bahwa pekerja berketerampilan tinggi stagnan dan lulusan universitas makin banyak masuk ke pekerjaan rendah keterampilan, maka reformasi pendidikan saja tidak cukup; permintaan atas pekerjaan berkualitas juga harus diciptakan melalui kebijakan industri, iklim usaha, inovasi, dan pembukaan pasar yang lebih kompetitif. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Implikasi ketiga adalah stabilisasi biaya hidup. Inflasi 4,76 persen pada Februari 2026 memperlihatkan bahwa rumah tangga masih sensitif terhadap kenaikan harga. Karena itu, pengendalian inflasi harus diarahkan secara khusus pada komponen yang paling dekat dengan kehidupan rumah tangga, terutama pangan dan utilitas dasar. Stabilitas harga bukan hanya agenda moneter, tetapi juga agenda kesejahteraan mikro. Setiap perbaikan pendapatan riil akan cepat hilang bila harga kebutuhan pokok naik lebih cepat daripada pendapatan rumah tangga. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Implikasi keempat adalah perlunya strategi yang lebih tegas untuk mengurangi ketimpangan spasial. Dominasi Jawa dalam struktur ekonomi dan perbedaan tajam kemiskinan kota-desa menunjukkan bahwa pembangunan wilayah tetap menjadi isu sentral. Pemerataan tidak identik dengan membagi-bagi angka secara sama, tetapi dengan memperluas kemampuan wilayah di luar pusat pertumbuhan untuk menciptakan produktivitas, pasar, dan pekerjaan yang layak. Ini menyangkut infrastruktur, logistik, pendidikan, konektivitas digital, dan kelembagaan ekonomi lokal. Tanpa perbaikan di sisi ini, Indonesia akan terus memiliki makro nasional yang kuat tetapi peta kesejahteraan mikro yang timpang. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Implikasi kelima adalah perlindungan sosial harus melihat **kerentanan**, bukan hanya **kemiskinan resmi**. Angka 8,25 persen penting, tetapi kebijakan yang hanya fokus pada penduduk miskin ekstrem akan melewati rumah tangga yang sedikit di atas garis kemiskinan namun sangat rapuh terhadap inflasi dan guncangan pendapatan. Dalam ekonomi yang masih didominasi sektor bernilai rendah dan pekerjaan informal, lapisan rentan ini sangat besar. Memperkuat perlindungan sosial, pembiayaan kesehatan, dukungan pendidikan, dan instrumen penyangga konsumsi menjadi penting agar perbaikan makro tidak mudah terhapus oleh shock kecil di tingkat keluarga. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kesimpulan

Makalah ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal 2026 tidak sedang gagal, tetapi juga belum cukup inklusif untuk otomatis menjadi kesejahteraan mikro yang dirasakan luas. Secara makro, Indonesia mencatat banyak indikator yang sehat: ekonomi 2025 tumbuh 5,11 persen, ekspor masih kuat, keyakinan konsumen optimistis, penjualan eceran meningkat, dan kemiskinan serta ketimpangan pengeluaran menunjukkan perbaikan. Semua ini penting dan patut diakui sebagai fondasi yang bernilai. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, kesejahteraan mikro berjalan dengan logika yang lebih dekat dengan kehidupan konkret rumah tangga. Di level itu, pertumbuhan nasional bertemu dengan upah yang terbatas, pekerjaan yang belum cukup berkualitas, biaya hidup yang menanjak, ketimpangan kota-desa, konsentrasi pertumbuhan di Jawa, dan kerentanan kelompok yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan. Laporan Bank Dunia memperkuat kesimpulan ini dengan menunjukkan menyusutnya pekerjaan kelas menengah, stagnannya pekerjaan berketerampilan tinggi, dan investasi yang masih dominan mengalir ke sektor bernilai lebih rendah. Karena itu, masalah Indonesia bukan sekadar seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi

seberapa luas manfaat pertumbuhan itu benar-benar mengubah kualitas hidup. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan “mengapa kinerja makro belum selalu menjadi kesejahteraan mikro?” adalah karena pertumbuhan tanpa pemerataan tetap menyisakan jarak antara angka nasional dan pengalaman rumah tangga. Pertumbuhan adalah syarat penting, tetapi belum cukup. Ia harus disertai pemerataan kesempatan, penciptaan good jobs, stabilitas biaya hidup, dan penyebaran produktivitas yang lebih adil antarwilayah dan antarkelompok sosial. Barulah makro yang baik dapat benar-benar diterjemahkan menjadi mikro yang sejahtera. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Glosarium

Daya beli

Kemampuan rumah tangga membeli barang dan jasa dengan pendapatan yang dimilikinya.

Gini ratio

Ukuran ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan; makin tinggi nilainya, makin timpang distribusinya.

Good jobs

Pekerjaan dengan produktivitas, stabilitas, upah, dan prospek mobilitas sosial yang lebih baik.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Indikator persepsi rumah tangga terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa depan.

Inflasi inti

Komponen inflasi yang cenderung lebih stabil karena tidak terlalu dipengaruhi gejolak pangan dan harga yang diatur pemerintah.

Kemiskinan

Kondisi ketika pengeluaran minimum seseorang atau rumah tangga berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan.

Kesejahteraan mikro

Kualitas hidup yang dirasakan pada tingkat rumah tangga, mencakup pendapatan riil, stabilitas kerja, akses layanan, dan rasa aman ekonomi.

Kinerja makro

Capaian ekonomi pada tingkat agregat nasional, seperti pertumbuhan PDB, inflasi, perdagangan, dan pengangguran.

PDB per kapita

Rata-rata output ekonomi per penduduk.

Volatile food

Komponen pangan yang harganya mudah berfluktuasi karena musim, pasokan, dan distribusi.

Referensi (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2026a). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026b). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026c). *Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363*. Badan Pusat Statistik.

Rudy C Tarumingkeng: Pertumbuhan tanpa Pemerataan: Mengapa Kinerja Makro Belum Selalu Menjadi Kesejahteraan Mikro

Badan Pusat Statistik. (2026d). *November 2025: Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,74 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026e). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026f). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Januari 2026 sebesar 3,55 persen*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026g). *Ekspor dan impor Indonesia Januari 2026 masing-masing tercatat USD22,16 miliar dan USD21,20 miliar*. Badan Pusat Statistik.

Bank Indonesia. (2026a). *Survei konsumen Februari 2026: Keyakinan konsumen tetap kuat*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026b). *Survei penjualan eceran Februari 2026: Penjualan eceran diperkirakan meningkat*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026c). *Inflasi IHK Februari 2026 tetap terkendali*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026d). *BI-Rate tetap 4,75%: Mempertahankan stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026e). *Cadangan devisa Februari 2026 tetap tinggi*. Bank Indonesia.

World Bank. (2025). *Indonesia's economy maintains resilience amid global uncertainty*. World Bank.

World Bank. (2026). *Running faster, for longer: Structural transformation, productivity, and good jobs*. World Bank.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 1 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

Rudy C Tarumingkeng: Pertumbuhan tanpa Pemerataan: Mengapa Kinerja Makro Belum Selalu Menjadi Kesejahteraan Mikro

<https://chatgpt.com/c/69ccaabe-5698-839f-b0a3-4c1460747946>